



RENCANA STRATEGIS Program Studi Ilmu Politik Tahun 2021 - 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas Rahmat dan Hidayah yang telah dilimpahkan, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi (PS) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2021 - 2025 telah dapat terselesaikan.

Renstra PS Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini disusun berdasarkan pada Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Renstra Universitas Brawijaya, serta bersumber dari dokumen hasil Evaluasi Diri terdahulu yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman PS Ilmu Politik.

Renstra PS Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini disusun dalam rangka memberikan arah pengembangan PS Ilmu Politik dalam 4 tahun ke depan sebagai kelanjutan atas Renstra PS Ilmu Politik terdahulu. Renstra ini juga dijiwai oleh kebijakan dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, sehingga arah pengembangan fakultas tetap searah dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Malang, 12 Februari 2021

Ketua Program Studi

ttd



Juwita Hayuning Prastiwi, S.IP.,
M.IP.

NIP. 196412301993031002

DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PROFIL PROGRAM STUDI ILMU POLITIK	4
1.1. Identifikasi Kondisi Umum.....	4
1.2. Potensi dan Analisis Permasalahan	5
1.3. Tantangan	10
BAB II	18
VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI	18
2.1. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat unit pengelola program studi sarjana	18
2.3. MISI	22
2.4. TUJUAN.....	23
BAB III	25
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KELEMBAGAAN	25
3.1. Arah Kebijakan.....	25
3.2. Kelembagaan	27
BAB IV	29
TARGET KINERJA.....	29
BAB V	40
PENUTUP	40

BAB I

PROFIL PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

1.1. Identifikasi Kondisi Umum

Perguruan tinggi merupakan komponen penting dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Program studi sebagai bagian dari perguruan tinggi, memegang peran dalam mengemban amanah pendidikan nasional dengan menghasilkan lulusan dan produk iptek yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Program Studi Ilmu Politik (PS Ilmu Politik) adalah salah satu program studi yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). Berdirinya PS Ilmu Politik ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: SK Dirjen Dikti nomor 141/DT/2009. Berdasarkan SK tersebut PS Ilmu Politik FISIP UB beroperasi sejak tahun akademik 2009/2010.

PS Ilmu Politik dikelola oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Koordinator PS Ilmu Politik, yang disebut sebagai pimpinan unit kerja. Ketua dan Koordinator PS Ilmu Politik ini dilengkapi dengan bagian administrasi akademik tenaga kependidikan (tendik) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium. UPT meliputi Tim Kurikulum, Tim Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir, Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD), Pengelola Jurnal dan Website; serta Laboratorium meliputi Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa).

PS Ilmu Politik FISIP UB yang baru berdiri hampir satu setengah dekade ini, dikelola dengan mendapat dukungan dari pihak internal maupun eksternal. Dukungan ini berasal dari segenap dosen, pejabat dan tendik di PS Ilmu Politik serta semua elemen di level fakultas dan universitas.

Tabel 1. Dosen Program Studi Ilmu Politik Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
Doktor	7	Lektor Kepala	3
Master	13	Lektor	3
Kandidat Doktor	1	Asisten Ahli	10
		Tenaga Pengajar	5
Total	21	Total	21

Sementara dukungan eksternal berasal dari lembaga pemerintah di luar kampus, lembaga non pemerintah serta segenap *stakeholder* di bidang pendidikan yang relevan dalam ilmu politik. Dukungan ini diharapkan akan mampu mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan. PS Ilmu Politik telah menghasilkan lulusan yang diterima lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga kepemiluan dan partai politik, di perusahaan swasta, perbankan dan organisasi lain yang relevan, serta oleh perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri baik sebagai dosen maupun untuk studi lanjut di tingkat Strata 2.

PS Ilmu Politik juga semakin dipercaya oleh pemangku kepentingan, hal ini bisa dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa yang berminat masuk ke PS Ilmu Politik setiap tahun. Oleh karena itu, PS Ilmu Politik akan selalu berupaya untuk memenuhi kriteria terbaik yang telah ditetapkan dalam setiap komponen penilaian akreditasi. Kepercayaan pihak eksternal juga bisa dilihat dari makin meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang: dalam rangka penelitian, pemagangan mahasiswa, serta kegiatan akademik lain dalam bentuk seminar serta studi banding.

1.2. Potensi dan Analisis Permasalahan

Dalam kurun empat tahun sejak berdiri, PS Ilmu Politik telah menyusun rencana pencapaian dalam jangka panjang dan menengah, yang diaktualkan dalam visi-misi PS Ilmu Politik. PS Ilmu Politik saat ini memiliki visi menjadi program studi yang bereputasi di tingkat internasional pada tahun 2024. Visi tersebut dicapai melalui implementasi misi dan tujuan Program Studi yang ada di tahun ini. Program Studi Ilmu Politik telah merumuskan pemetaan konsentrasi, dengan menetapkan fokus kajian minat unggulan antara lain Konsentrasi Demokrasi dan Politik Elektoral, Konsentrasi Politik Indonesia, dan Konsentrasi Kewirausahaan Politik dan Kebijakan.

Strategi di atas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang melibatkan seluruh dosen PS Ilmu Politik serta mengundang pemangku kepentingan yang relevan dengan keilmuan politik. Metode yang digunakan adalah melalui FGD dan workshop beberapa hari, untuk merumuskan visi misi yang berbasis kondisi internal serta perkembangan eksternal ilmu politik. Hasil dari FGD dan Workshop penentuan visi-

misi ditindaklanjuti melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Hasil dari SWOT ini secara sekilas, menunjukkan bahwa PS Ilmu Politik berada pada kuadran kanan atas (dalam diagram Cartesius), sehingga berpeluang mengembangkan lembaga secara lebih ekspansif.

Penyelenggaraan Program Studi yang baik tidak terlepas dari tata pamong yang baik. Sedangkan tata pamong yang baik ditunjukkan melalui pola kepemimpinan yang baik pula hal ini meliputi kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. Pola kepemimpinan operasional diwujudkan dengan profesionalisme Ketua Program Studi dalam mengelola kegiatan akademik dan operasional Program Studi dan juga keaktifan dosen program studi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Pengelolaan profesional ditunjukkan dengan tata kelola Program Studi yang efektif dan efisien.

Dalam mengelola organisasi PS Ilmu Politik, yang beranggotakan kumpulan akademisi, diperlukan model kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. Salah satu yang menjadi corak kepemimpinan egaliter dalam PS Ilmu Politik adalah melalui pola kerja partisipatif dalam hal perencanaan program, perencanaan anggaran dan menggunakan metode *bottom up* yang memungkinkan setiap sivitas akademika mengusulkan serta mengajukan saran atau pendapat demi kemajuan pengelolaan Program Studi. Kepemimpinan publik ditunjukkan melalui kemampuan Ketua Program Studi dalam menghasilkan output yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, diantaranya melalui pengembangan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, baik dengan pemerintah daerah dan organisasi sosial non pemerintah.

Struktur organisasi PS Ilmu Politik, secara hirarkis di bawah tanggung jawab Ketua PS Ilmu Politik dan Koordinator PS Ilmu Politik. Jabatan pimpinan ini yang kemudian dikenal dengan istilah tata pamong organisasi. Tata pamong ini ditunjukkan dalam struktur organisasi yang menggambarkan garis tanggung jawab, wewenang, koordinasi dan arahan yang jelas.

Dalam tata pamong di PS Ilmu Politik, Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu akademik dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi komponen pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tata pamong ini dilengkapi dengan bagian administrasi akademik tenaga kependidikan (tendik) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium. UPT meliputi Tim Kurikulum, Tim Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir, Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD), Pengelola Jurnal dan Website; serta Laboratorium meliputi Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa). Termasuk didukung oleh tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan PPHI (yang secara hirarkis ada dalam koordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas. Keberhasilan PS Ilmu Politik dalam menjalankan kinerja Tri Dharma merupakan implikasi tata pamong yang baik, disamping adanya dukungan dalam bentuk kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan pada Program Studi Ilmu Politik.

Pada aspek penerimaan mahasiswa baru, Program Studi Ilmu Politik berusaha untuk memperoleh calon mahasiswa yang meningkat secara kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun. Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru mengacu pada standar yang selalu diperbaharui, dengan menerapkan sistem seleksi yang baik diharapkan terdapat peluang yang besar untuk memperoleh calon mahasiswa baru yang berkualitas. Terdapat beberapa sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dari berbagai pintu masuk. Secara kuantitatif jumlah peminat setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi yang bisa diterima hanya sesuai kapasitas daya tampung yang ditetapkan di PS Ilmu Politik. Peningkatan minat calon mahasiswa baru masuk ke PS Ilmu Politik menunjukkan citra PS ini semakin baik. Hal ini dipengauhi oleh banyaknya mahasiswa Ilmu Politik yang terlibat dalam berbagai kompetisi nasional dan meraih penghargaan, yang secara tidak langsung turut mempromosikan PS Ilmu Politik ke calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Ketika mahasiswa baru diterima dalam PS Ilmu Politik, mereka akan mengikuti kegiatan pengenalan kampus, baik terhadap fasilitas pendidikan, keberadaan dosen yang berkualitas, maupun terhadap kurikulum dan metode pembelajaran yang akan memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat

waktu dengan nilai memuaskan. Mahasiswa baru akan memperoleh penjelasan secara rinci dan menyeluruh tentang kegiatan akademik dan non akademik di PS Ilmu Politik pada melalui berbagai kegiatan pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru (PKK Maba). Kegiatan ini biasanya dimulai dari pengenalan secara umum di level fakultas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di level prodi.

Pada kesempatan PKK Maba ini setiap mahasiswa akan baru mendapatkan Buku Panduan Akademik, penjelasan yang terkait dengan Pembimbing Akademik, Pembimbing Praktek Kerja Nyata (PKN), Pembimbing Tugas Akhir dan pembina unit kegiatan mahasiswa. Tata cara dan alur pembimbingan akademik juga diperkenalkan secara sistematis, oleh pengurus Himapol dan dosen pendamping kegiatan mahasiswa. dalam penjelasan ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman bahwa dosen pembimbing akademik, dosen pengampu mata kuliah, dosen praktikum, pembimbing tugas akhir bertugas memberikan konsultasi sistem evaluasi kemajuan belajar yang mencakup ujian PKN, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ini sangat penting dsampaikan bagi mahasiswa baru, karena hal demikian belum mereka alami dalam pendidikan di tingkat SMP dan SMA.

Penjelasan perihal Sistem Kredit Semester (SKS) juga diberikan saat PKK Maba, serta di setiap awal perkuliahan di semester satu. Hal ini agar membiasakan mahasiswa baru menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran berbasis SKS yang menuntut kemandirian dan tanggung jawab mahasiswa. sebab, keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan model pembelajaran mandiri ini. Dalam model ini, mahasiswa harus mampu mengevaluasi capaian pembelajaran tiap semester mereka melalui kartu hasil studi (KHS) yang akan mereka terima setiap akhir semester. Dari situ, mahasiswa akan menyusun rencana studi dengan pembimbingan dosen pendamping akademik. Pengisian kartu rencana studi (KRS) yang masih menggunakan sistem manual, dipandu juga oleh mahasiswa senior (dari tim Advokesma Himapol) agar tidak keliru saat memilih mata kuliah dan kelas yang relevan.

Namun demikian, PS Ilmu Politik juga memiliki beberapa kelemahan, terutama tentang status akreditasi yang saat ini masih dalam taraf B (menurut BAN-PT). Pada tahun ini, PS Ilmu Politik sedang mempersiapkan diri menjelang visitasi

akreditasi untuk menjadi program studi dengan akreditasi unggul. Di dalam menghadapi masa transisi tersebut, PS Ilmu Politik telah banyak melakukan serangkaian proses evaluasi kinerja dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut: (1) Rata-rata lama studi mahasiswa PS Ilmu Politik berada pada angka 4 tahun 11 bulan; (2) Aspek sumber daya dosen, dimana PS Ilmu Politik belum memiliki dosen bersertifikasi kompetensi tertentu, dan belum memiliki dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar, dan hanya memiliki 1 dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, mayoritas dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar; (3) Rendahnya tingkat publikasi Internasional dan partisipasi dosen dalam konferensi internasional; (4) Secara kuantitas jumlah *visiting lecturer* masih rendah; (5) Rendahnya jumlah *inbound* dan *outbound* mahasiswa, serta rendahnya jumlah mahasiswa berwirausaha; (6) Belum memiliki kelas internasional.

Tabel 2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman PS Ilmu Politik

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
1. VTMS Prodi sangat jelas dan terukur dalam indikator yang jelas (waktunya terukur). 2. VTMS realistic dalam implementasi program-programnya. 3. Tingkat pemahaman stakeholders tinggi. 4. Sosialisasi yang difasilitasi dengan website. 5. Universitas Brawijaya sudah mendapatkan nama di masyarakat. 6. Tingginya minat pendaftar mahasiswa baru di Prodi Ilmu Politik.	1. Program Studi Ilmu Politik masih belum terakreditasi A. 2. Banyaknya kesibukan dosen di luar kampus. 3. Masih adanya calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi walaupun telah dinyatakan lulus seleksi. 4. Koordinasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan komitmen dosen pada prodi.	1. Universitas Brawijaya sudah mendapatkan nama di masyarakat. 2. Jumlah dosen yang sangat mencukupi. 3. Masih sangat terbuka kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. 4. Sarana dan prasarana yang mencukupi untuk membuka kelas internasional.	1. Kompetisi dengan Program Studi yang sama dari perguruan tinggi lain yang telah mendapatkan akreditasi A. 2. Masih ada mahasiswa yang tidak Menyelesaikan studi. 3. Masih banyaknya kesibukan dosen di luar kampus yang menyebabkan komitmen untuk program studi berkurang.
1. Tata pamong disusun jelas berdasarkan peraturan yang jelas. 2. Tata pamong dilaksanakan meliputi 5 (lima) aspek secara	1. Dosen banyak yang berkiprah di luar kampus, sehingga kurang perhatian dengan kebutuhan di dalam prodi	1. Tertatanya tata pamong dengan baik. 2. Keluasan jaringan yang dibangun juga melalui dosen. 3. Monitoring dan	1. Persaingan Perguruan tinggi yang mempunyai program studi sama, karena Prodi Ilmu Politik FISIP UB belum

<p>konsisten (kredibel, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil).</p> <p>3. Karakter kepemimpinan kuat.</p> <p>4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional dilakukan dengan pendekatan planning, organizing, staffing, leading dan controlling.</p> <p>5. Prodi telah ada UJM dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>6. Upaya keberlanjutan prodi telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek secara komprehensif.</p> <p>7. Jaringan yang luas yang dimiliki oleh dosen.</p> <p>8. Promosi yang melekat pada setiap dosen ketika mendapatkan kepercayaan dari institusi lain.</p> <p>9. Prodi memberi keluasaan dosen untuk berkiprah di luar institusi dengan tetap patuh kewajiban.</p> <p>10. Dengan luasnya jaringan kesempatan untuk menambah kerjasama dengan institusi lain terbuka lebar.</p>	<p>sendiri.</p> <p>2. Pelaksanaan GJM dan UJM yang masih kurang koordinasi dan sinkron.</p> <p>3. Perlunya melibatkan dosen tentang unsur penilaian UJM kepada dosen, sehingga tumbuh sense of belonging yang tinggi.</p> <p>4. Kurangnya eksistensi dosen di dalam kampus.</p> <p>5. Dosen semakin terpicu untuk berkompetensi eksis di luar kampus.</p> <p>6. Beberapa dosen yang belum mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di luar kampus.</p>	<p>evaluasi dilakukan secara rutin oleh UJM Prodi.</p>	<p>terakreditasi A.</p> <p>2. Tingginya kompetisi antar dosen di luar kampus yang semakin menyebabkan dosen eksis di luar kampus.</p>
---	--	--	---

1.3. Tantangan

Saat mahasiswa telah menempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku, mahasiswa akan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria lulus sesuai buku panduan. Yakni ketika mereka telah menempuh sekurang-kurangnya 144 SKS, dengan IPK minimal 2,00, nilai D maksimal 22 SKS. Dengan kondisi lingkungan dan proses pembelajaran yang kondusif akan berpengaruh pada tersedianya lulusan yang kompeten.

Proses pembelajaran di PS Ilmu Politik selalu ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Standar kompetensi lulusan ini dijabarkan secara detail selain dalam dokumen kurikulum PS Ilmu Politik, juga dituangkan dalam rancangan pembelajaran semester (RPS) yang disusun setiap mata kuliah. Akumulasi dari capaian pembelajaran (CPL) masing-masing mata kuliah ini jika diakumulasi akan menjadi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam *learning outcome* PS Ilmu Politik.

Setidaknya, terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh Program Studi Ilmu Politik baik saat ini maupun di masa mendatang. **Pertama** berkaitan **tantangan penyelenggaraan Kampus Merdeka**, serta **kedua** mengenai **tantangan lulusan yang dihasilkan Program Studi**. PS Ilmu Politik telah melakukan tracer study untuk mendapatkan informasi tentang lulusan. Dari data *Tracer Study* yang dilakukan pada tahun 2020 ini, terdapat 134 responden mengisi kuesioner yang dikirim melalui *google form*. Berdasarkan jawaban dari responden, terdapat total 8 angkatan yang mengisi form mulai angkatan 2008 hingga 2015 dan tercatat angkatan 2012 yang paling banyak berpartisipasi dengan persentase sebesar 23,1 %. Adapun responden angkatan 2018 yang mengisi kuesioner berjumlah 1 orang (0,7 %), tidak relevan diulas lebih lanjut dalam laporan ini sebab mahasiswa angkatan 2018 masih dalam masa studi dan belum menjadi alumni. Berikut adalah distribusi responden yang mengisi *Tracer Study* berdasarkan angkatan:

Tahun Masuk								
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
9	19	19	12	31	14	13	16	133

Sumber: Tracer Studi Prodi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya 2020

Tracer Study Prodi Ilmu Politik Tahun 2020 melihat beberapa aspek terkait karakteristik dan pendidikan terakhir alumni, proses pencarian kerja alumni, pekerjaan alumni setelah lulus, daya saing alumni, relevansi bidang studi dengan pekerjaan alumni, kompetensi umum yang dikuasai alumni, serta kepuasan alumni terhadap program studi. Berikut dijelaskan beberapa aspek tersebut:

- Terdapat 24 orang (17,9%) alumni yang memiliki jenjang pendidikan strata dua (S2) atau setidaknya sedang menyelesaikan pendidikannya di jenjang

pascasarjana. Sisanya, 110 orang (82,1%) masih berstatus alumni dengan gelar strata satu.

- Alumni PS Ilmu Politik yang lulus sejak tahun 2008-2020 telah terserap dalam dunia, dimana 106 orang (79,1%) yang telah mendapatkan pekerjaan. Sementara 10 orang (7,5%) pernah bekerja dan sekarang mencari pekerjaan baru. Terdapat 12 orang alumni sedang studi lanjut dan hanya menyisakan 6 orang (4,5%) yang menjawab belum bekerja dan saat ini masih sedang mencari pekerjaan dari total 134 alumni yang mengisi kuesioner.
- Hasil *Tracer Study* Program Studi Ilmu Politik menunjukkan bahwa karakteristik lulusan sebagian besar bekerja di instansi pemerintahan termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 44 orang (33,6%) dan di instansi swasta sebanyak 28 orang.
- Secara umum, alumni PS Ilmu Politik membutuhkan waktu tunggu mulai dari 0-6 bulan untuk bisa mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dimana persentase untuk alumni yang berada di rentang waktu pencarian tersebut mencapai 76 persen.
- Peluang mendapatkan pekerjaan pertama alumni Prodi Ilmu Politik adalah besar yang ditunjukkan oleh data 58,6 persen (78 orang). Meskipun ada 41,4 persen (55 orang) yang mengalami kesulitan, hal tersebut lebih disebabkan oleh jarangya lowongan pekerjaan dan tidak sesuaiya lowongan pekerjaan yang ada dengan bidang keahlian.
- Secara umum, alumni PS Ilmu Politik menyatakan ada kesesuaian yang erat antara bidang studi dengan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh data 70,7 persen alumni yang menjawab ada hubungan erat antara bidang ilmu dengan pekerjaan mereka saat ini. Kesesuaian ilmu yang diperoleh saat kuliah untuk mendukung profesi.

PS Ilmu Politik yang telah berusia setengah dasawarsa, selalu berusaha meningkatkan kompetensi lulusan dengan berbagai metode. Kompetensi yang berbasis keterampilan mahasiswa dalam Beberapa mata kuliah diberikan melalui metode praktikum, dengan praktik lapangan, atau menghadirkan praktisi untuk mendukung pembelajaran di kelas yang sistematis. Selain itu, ada metode yang mewajibkan mahasiswa menempuh mata kuliah Praktek Kerja Nyata (PKN), yang

dilakukan di instansi eksternal kampus. PKN bisa dilakukan di instansi pemerintahan, lembaga DPR/D, partai politik, LSM, Pemerintah Desa serta lembaga-lembaga penelitian atau lembaga konsultan politik. Selain itu, keterampilan mahasiswa juga diperkuat dengan pelatihan/*workshop*, *survey* popularitas/elektabilitas calon pemimpin daerah, serta keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non akademik yang didukung penuh oleh PS Ilmu Politik.

Dalam rangka mencapai visi misi PS Ilmu Politik yang sudah dicanangkan, perlu ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen- mahasiswa) dosen dan tenaga kependidikan. Elemen paling penting dalam mempengaruhi pencapaian visi PS Ilmu Politik adalah dosen dan tenaga pendukung. PS Ilmu Politik memiliki 18 dosen tetap dan 5 dosen luar biasa. Jabatan akademik dan jenjang pendidikan dosen tetap sangat memadai, yakni minimal berpendidikan S2, dua diantaranya telah bergelar Doktor. Semua dosen yang ada dalam PS Ilmu Politik memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum, hal ini didapatkan melalui proses seleksi dosen baru yang disesuaikan dengan kebutuhan keahlian dosen yang belum terpenuhi. Setiap dosen mempunyai pengalaman mengajar (baik di dalam kampus, maupun sebelum menjadi dosen) dan membimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya. Proses ini dilakukan secara partisipatif dalam plotting pembimbingan yang dilaksanakan di setiap awal semester.

Mengacu pada visi misi PS Ilmu Politik, menyebutkan bahwa tujuan utama PS Ilmu Politik yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam keilmuan politik, dapat diwujudkan dengan dukungan kurikulum berbasis kompetensi yang memadai. Kurikulum PS Ilmu Politik disusun oleh Tim Kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja, alumni, masukan pengguna lulusan, pemangku kepentingan, dan mahasiswa dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Kurikulum PS Ilmu Politik memuat mata kuliah Wajib Universitas, mata kuliah Wajib Fakultas, mata kuliah Wajib Program Studi dan mata kuliah Pilihan. 100% mata kuliah memiliki SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan diupload ke dalam website PS Ilmu Politik, sehingga bisa diakses mahasiswa.

Demi menjaga kualitas dan kontekstualitas kurikulum, maka PS Ilmu Politik melakukan evaluasi berkala dan menyeluruh pada kurikulum yang ada. Evaluasi ini dilakukan setiap maksimal 5 (lima) tahun sekali. Sementara evaluasi kurikulum

melalui peninjauan RPS dilakukan setiap awal semester dengan melibatkan para dosen yang tergabung dalam kelompok dosen keahlian, tim pengampu mata kuliah, Ketua dan Sekretaris PS serta perwakilan mahasiswa dari berbagai angkatan aktif. Evaluasi kurikulum setiap semester bisa dalam bentuk perubahan dalam SAP saja, baik materi, metode pembelajaran, penilaian maupun buku referensi.

Setelah kurikulum dan segenap penunjangnya diperbaiki secara regular, maka proses pembelajaran menjadi kunci keberhasilan capaian PS Ilmu Politik. Maka menjadi penting untuk mengontrol proses pembelajaran yang dilakukan semua dosen dalam PS Ilmu Politik. Dari hasil pengawasan ini, Ketua dan Sekretaris PS Ilmu Politik beserta tim UJM PS melakukan evaluasi. Evaluasi didasarkan pada kinerja dosen yang dituangkan dalam dokumen laporan Beban Kinerja Dosen (BKD), penilaian rekan sejawat, serta penilaian mahasiswa yang dilakukan setiap akhir semester. Bagi dosen dengan kinerja baik akan mendapatkan apresiasi, namun bagi dosen yang mendapatkan banyak kritik dan penilaian kurang baik dari mahasiswa serta kolega akan mendapatkan teguran dari Ketua PS sebagai pimpinan unit kerja.

Secara umum, jika mengacu pada RPS yang disusun tiap mata kuliah, proses pembelajaran dalam PS Ilmu Politik dilakukan melalui pendekatan interaktif dan partisipatif. Dalam hal ini peran dosen lebih pada fasilitator pembelajaran, sehingga para mahasiswa diberi kebebasan bertanya dan didorong untuk terbiasa mengeluarkan pendapat dengan baik, mendengarkan pendapat orang lain, percaya diri serta mampu bekerjasama dan memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis yang tinggi. Hal ini tertuang di dalam metode pembelajaran yang digunakan dan elemen penilaian dalam RPS masing-masing mata kuliah. Seluruh mata kuliah memiliki elemen penugasan, baik yang dikerjakan di kelas dalam bentuk studi kasus, soal latihan, makalah, presentasi, simulasi, maupun tugas terstruktur dalam bentuk observasi lapang, pencarian data serta melakukan eksperimen akademis.

Dalam rangka meningkatkan terciptanya suasana akademik, PS Ilmu Politik memberikan otonomi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen – mahasiswa. kegiatan mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa (Hima) difasilitasi oleh PS Ilmu Politik melalui berbagai cara, baik dalam hal pendanaan, penyediaan narasumber dari dosen PS, atau pendampingan kegiatan dalam bentuk sudi ekskursi atau perkuliahan lapangan. Kebebasan akademik bagi

mahasiswa juga dijunjung tinggi, baik dalam hal kebebasan menyampaikan gagasan maupun mendorong mahasiswa terlibat dalam advokasi kasus bagi kelompok masyarakat sub-ordinat, atau melakukan gerakan politik (aksi) dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak adil.

Selain pada aspek pengajaran, PS Ilmu Politik juga terus mengembangkan ketersediaan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa agar optimal dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. PS Ilmu Politik memiliki sarana dan prasarana dengan kuantitas dan kualitas memadai sebagai penunjang tersebut. Prasarana fisik yang tersedia misalnya berupa ruang kuliah yang nyaman, ruang diskusi untuk dosen dan mahasiswa (di dalam gedung maupun *out door*), ruang kerja dosen sesuai jumlah dosen, ruang perpustakaan/ruang baca, ruang administrasi, ruang unit kegiatan mahasiswa dan ruang laboratorium.

Prasarana fisik dilengkapi dengan sarana komputer dalam jumlah mencukupi, *hot spot*, buku teks, jurnal dan koleksi lain yang terkini, serta *software* aplikasi pengolah data yang bisa digunakan mahasiswa secara gratis. Prasarana pendukung lain juga tersedia dengan baik, misalnya seperti lahan parkir yang luas dan aman, tempat ibadah (di dalam kantor PS maupun di gedung fakultas), poliklinik, lapangan olah raga, ruang unit kegiatan mahasiswa, lobby, taman, gedung pertemuan dan lain-lain. Sarana dan prasarana PS Ilmu Politik yang sifatnya umum, bisa digunakan secara bersama-sama dengan PS lain di lingkungan FISIP UB dan sangat dapat memenuhi untuk proses belajar mengajar, misalnya laboratorium computer, koperasi, kantin dan ruangan laktasi.

Dalam hal pendanaan untuk proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: dari mahasiswa (SPP), dana PNBP, BOPTN dan dana APBN. Selain itu, sebagai penunjang dana juga diperoleh melalui kerja sama PS Ilmu Politik maupun dosen PS Ilmu Politik dengan lembaga luar kampus, dengan skema penelitian maupun kerja sama pengabdian masyarakat. Kerja sama ini selain menghasilkan dana untuk peningkatan pembelajaran, juga meningkatkan peluang mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang atau penelitian.

Variabel-variabel yang telah dibahas di atas, merupakan variabel internal yang senantiasa diperkuat oleh PS Ilmu Politik untuk meningkatkan kualitas. Namun

demikian, terdapat pula variabel eksternal yang turut mempengaruhi peningkatan kualitas PS Ilmu Politik dalam mencapai visi dan misinya. Secara eksternal, PS Ilmu Politik dihadapkan pada ancaman persaingan antar PS sejenis yang terus meningkat (khususnya dari PTN di seluruh Indonesia). Persaingan tersebut hadir bersama tuntutan stakeholder yang semakin tinggi dan teknologi informasi yang semakin meningkat dengan cepat.

Menyadari permasalahan eksternal di atas, PS Ilmu Politik dengan berbagai kekuatan yang dimiliki, juga dengan kelemahan dan peluang serta ancaman, berusaha menyusun strategi pencapaian visi misi yang terukur. Strategi ini disusun dalam dokumen evaluasi diri, yang diantaranya berisi strategi PS mengacu pada hasil analisis SWOT yang dibuat saat mengajukan penilaian akreditasi PS. Dalam analisis SWOT tersebut, PS Ilmu Politik ada dalam potensi besar menjadi PS yang unggul di Indonesia jika mampu menonjolkan aspek kekhasan PS di antara PS Ilmu Politik lain di PTN (terutama yang ada di Pulau Jawa). Diferensiasi ini menjadi penting agar menarik minat calon mahasiswa yang selama ini hanya memiliki preferensi program studi politik di UI, UGM atau Unair.

Selain perihal diferensiasi, dalam rangka meningkatkan daya saing PS Ilmu Politik UB dengan PTN lain, adalah: (a) meningkatkan jenjang pendidikan dosen; (b) meningkatkan kompetensi dosen melalui program non gelar; (c) evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (d) menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik dan non akademik.

Strategi PS yang berkaitan dengan proses antara lain adalah (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat; (b) menciptakan suasana akademis yang kompetitif bagi dosen dan mahasiswa; (c) melakukan studi pelacakan secara terus menerus; (d) mendesain sistem pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pengguna lulusan; (e) menyelenggarakan proses pembelajaran dengan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE); serta menciptakan atmosfer akademik yang kondusif.

Strategi PS yang berkaitan dengan *output* antara lain adalah (a) bekerjasama dengan institusi terkait yang relevan dengan ilmu politik; (b) meningkatkan kompetensi lulusan dengan meningkatkan IPK, mendorong mahasiswa lulus tepat waktu, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa berbahasa internasional.

Untuk mewujudkan visi dan misi PS Ilmu Politik, sebagaimana dijabarkan pada bab terdahulu, maka PS Ilmu Politik menyusun rencana kerja dalam kurun waktu 4 tahun dan rencana kerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana strategis ini disusun dalam rangka berkontribusi mencapai visi misi fakultas dan visi misi Universitas.

Penyusunan Rencana Strategis PS Ilmu Politik 2021 – 2025 ini diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis sebagai program kerja jangka menengah selama 4 tahun ke depan. Selanjutnya proker tersebut, dipecah menjadi rencana program tahunan, dan proker ini menjadi dasar penyusunan anggaran keuangan dan acuan operasional tahunan PS yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI

2.1. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di tingkat unit pengelola program studi sarjana

Pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui surat Dikti No. 2297/D2.2/2008, usulan pembukaan Program Studi Ilmu Politik mendapatkan respon dari Dikti, dengan melakukan beberapa revisi, yaitu (1) analisis peminat dan kebutuhan lulusan serta analisis prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan, (2) kompetensi lulusan agar disusun dengan kemampuan sebagai “apa” dan substansinya “bagaimana” yang dibuat dalam bentuk matriks baik kompetensi utama, kompetensi pendukung maupun kompetensi lainnya yang dikaitkan dengan elemen kompetensi, kemudian kurikulum dan proses pembelajarannya dijabarkan untuk mencapai kompetensi tersebut. Mengacu kepada SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK Mendiknas No. 045/U/2002, (3) dosen tetap diajukan jurang dari 3 orang lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan program studi yang diusulkan, (4) melampirkan daftar buku perpustakaan dengan mengacu pada lampiran SK Mendiknas No. 234/U/2000.

Dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi seluruh *stakeholder* ikut terlibat. Berikut *stakeholder* yang terlibat dalam proses penyusunan:

1. Anggota DPR RI Dapil malang raya : Ir. H.M. Ridwan Hisjam
2. Pegiat Media : Taufiqurrahman, M.Si
3. Komisioner KPU Kota Malang
4. Komisioner Bawaslu Kota Malang
5. Media Lokal : Radar Malang dan Malang Post
6. NGO/LSM Malang Raya : WCC Dian Mutiara, Averoes dan SPD Kota Batu
7. Perwakilan Alumni : angkatan 2008 - 2014
8. Perwakilan Mahasiswa di tiap angkatan ; 2014 – 2018

Proses penyusunan awal adalah disusun oleh ketua program studi yang ditunjuk dengan SK Dekan. Untuk selanjutnya dibawa ke rapat pimpinan. Dengan memperhatikan beberapa masukan, yaitu baik dari internal maupun eksetran, yaitu alumni dan pengguna lulusan (untuk mengetahui perubahan kebutuhan pasar kerja). Lebih lanjut mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah :

penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) sebagai pengelola PS IP FISIP UB dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Sebagai awal dibentuk tim penyusun Visi Misi Tujuan dan Sasaran FISIP UB yang diketuai oleh Dekan dan melibatkan berbagai komponen *stakeholders* yakni pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat (masuk dari masyarakat ini dilakukan dengan cara mengadakan diskusi ilmiah, lokakarya, maupun *workshop*). Beberapa pihak yang terlibat adalah : alumni, *user* (anggota legislatif daerah, institusi pengguna lulusan, seperti kantor pemerintahan). Proses ini diharapkan menghasilkan visi misi dan tujuan di tingkat Fakultas dan Program Studi yang saling berkaitan dan merespon usulan dari *stakeholders*.
2. Selanjutnya membentuk tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada tingkat Program Studi yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan.
3. Masukkan yang diperoleh kemudian dihimpun dan didokumentasikan untuk ditindak lanjuti dengan melakukan diskusi secara komprehensif untuk memperoleh masukan-masukan dari *stakeholders* dan selanjutnya dilakukan proses perumusan final visi misi tujuan dan sasaran.
4. Setelah perumusan dilakukan, setelah dikaji secara komprehensif, untuk selanjutnya dilakukan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP, termasuk juga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PS IP FISIP UB oleh Senat Fakultas yang sebelumnya didiskusikan secara mendalam terkait isi dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP dan Program Studi. Visi, Misi dan Tujuan PS IP FISIP UB kemudian disahkan oleh Senat Fakultas.
5. Guna pengenalan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah tersusun dan telah ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada *stakeholders* dan civitas akademika melalui rapat, sosialisasi, penyebaran brosur, buku pedoman akademik, serta penyebaran melalui *website* FISIP (<http://www.fisip.ub.ac.id>) dan *website* PS IP FISIP UB (<http://www.politik.ub.ac.id>)

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Merupakan salah satu Program Studi yang

berada di FISIP, dimana dimulai penyelenggaraan pada 20 Oktober 2008. Dengan berdasarkan SK pendirian Program studi : SK Dikti No. 141/D/2009. Tanggal SK izin operasional, tanggal 6 Februari 2009. Pertama kali mendapatkan akreditasi pada tahun 2013 berdasarkan SK BAN PT No. 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013. Dalam perjalanannya visi dan misi mengalami rekonstruksi begitu juga dengan kurikulum program studi. Pada awal pendirian Program Studi Ilmu Politik memiliki visi “Menjadi Program Studi Ilmu Politik yang unggul menuju standar internasional yang dinamis dan sensitif terhadap perubahan politik dan kebijakan baik pada tingkat masyarakat, negara maupun internasional”.

Selanjutnya mengikuti perkembangan keilmuan, kebijakan pemerintah tentang pendidikan, yaitu adanya kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan perubahan situasi dalam bidang politik yang terjadi, maka diadakan analisis dan perubahan visi, misi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sehingga visi Program Studi Ilmu Politik mengalami perubahan setelah dilakukan rekonstruksi visi, yaitu “Menjadi program studi berjiwa *entrepreneur* dan berstandar internasional yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial-politik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.” Perubahan visi dengan perubahan menjadi program studi yang berjiwa *entrepreneur* ini dikaji dengan beberapa pertimbangan, yaitu : (1) dibutuhkan satu perspektif alternatif yang *utilitarian-friendly*; (2) memaksimalkan demokrasi; (3) mendorong intitusi-intitusi politik mengoptimalkan otoritas untuk produktif *creting public value and generating public benefit*; (4) Ilmu Politik bukan saja memahami fenomena dan fakta politik namun mampu menjalankan *driving role* perubahan politik yang akuntabel.

Kajian terus dilakukan untuk penyempurnaan visi yang nantinya terkait dengan misi, tujuan dan sasaran program studi. Guna mendapatkan karakter program studi yang kuat, maka kajian untuk penyempurnaan visi dilakukan, sehingga dengan mengkaji visi universitas, yaitu “World Class Entrepreneurial University” dimana Universitas Brawijaya menjadi sangat responsif terhadap perkembangan keilmuan *entrepreneurial*, maka visi Program Studi Ilmu Politik mengalami perubahan (rekonstruksi), sehingga visi Program Studi Ilmu Politik “Menjadi Program Studi yang berwawasan *entrepreneurial* dan bereputasi internasional yang mampu menjawab tantangan perubahan politik yang berkeadilan dan beradab melalui proses

Tridharma Perguruan Tinggi”. Sejak pendiriannya mulai tahun 2008 dan mendapatkan ijin operasional di tahun 2009 Program Studi Ilmu Politik FISIP UB telah melakukan beberapa kali *review* guna penyempurnaan dan pemantapan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.

Program Studi Ilmu Politik dalam pelaksanaan pengelolaannya selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dengan berdasarkan Keputusan Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya No. 238 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2015/2016, Program Studi Ilmu Politik senantiasa meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Studi Ilmu Politik dikelola oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi Ilmu Politik, Bagian Administrasi Akademik dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium. UPT meliputi Unit Penjaminan Mutu (UJM), Pengelola *Website*, pada saat sekarang Program Studi Ilmu Politik telah melayani seluruh administrasi akademik secara *online*; Laboratorium meliputi Laboratorium Politik Dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa) dan *Research Group*.

2.2. VISI

“Menjadi program studi yang berwawasan *entrepreneurial* dan bereputasi internasional yang mampu menjawab tantangan perubahan politik yang berkeadilan dan beradab melalui proses Tridharma Perguruan Tinggi”

Visi prodi tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut : **menjadi program studi yang berwawasan *entrepreneurial***, maksudnya adalah : program studi selalu mampu menghasilkan kreasi yang berkelanjutan, tahap demi tahap yang menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, regional, maupun internasional. Memiliki karakter organisasi yang fleksibel dan cepat tanggap terhadap laju perubahan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam hal *entrepreneurial* adalah tidak selalu tentang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun lebih kepada bagaimana mampu untuk mengubah sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang bernilai lebih, *outward looking*. Pemikiran

Entrepreneurial mengarahkan pada praktek inovatif dari identifikasi dan atau penciptaan kesempatan, kemudian bertindak untuk mewujudkan kesempatan tersebut dalam cara yang produktif. Memiliki akses terhadap modal suatu sumber daya. Menjadi pendukung dana, mendanai sendiri, akses model politis, kemampuan untuk memanfaatkan tenaga kerja, rakitan teknologi tinggi, atau beberapa kombinasi di atas. Secara umum memerlukan sesuatu (tidak selalu uang) untuk menciptakan sesuatu yang lain

Sedangkan **bereputasi internasional** : Program Studi Ilmu Politik FISIP UB mampu menjadikan diri untuk mempunyai reputasi secara internasional dengan menjawab tantangan dengan berkarakter berkeadilan dan beradab, artinya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia dan tetap bertindak dengan mengedepankan moral kemanusiaan melalui proses tri dharma perguruan tinggi.

Untuk **berkeadilan dan beradab**: dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui proses tridharma perguruan tinggi.

2.3. MISI

Sebagai pelengkap visi yang sudah disusun, PS Ilmu Politik FISIP UB selanjutnya menyusun misi sebagai berikut:

1. Mendorong perbaikan kualitas Program Studi Ilmu Politik yang berkeadilan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Mendidik mahasiswa Ilmu Politik menjadi peneliti dan agen perubahan (*agent of change*) yang visioner, kritis, cerdas, peduli, berkeadilan dan beradab dalam menyikapi perubahan politik.
3. Menanamkan wawasan *entrepreneurial* dengan kemampuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memecahkan masalah bagi persoalan politik yang aktual.
4. Melakukan riset mutakhir dengan memperkuat riset grup dan mengembangkan kegiatan pembelajaran serta pengembangan jaringan antar institusi baik dalam dan luar negeri di bidang politik, sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik politik yang berkeadilan dan beradab.

5. Melaksanakan kegiatan pegabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi pada peningkatan kapasitas pemerintah, penguatan kapasitas masyarakat, serta meningkatkan kepekaan sosial untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan beradab serta bermartabat.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan institusi akademis dan non akademis di level lokal, nasional, dan internasional.

2.4. TUJUAN

Tingginya tuntutan capaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh PS Ilmu Politik FISIP UB mengikuti visi misi FISIP UB dan UB ini telah diperhitungkan secara rasional dan terukur. Visi dan misi di atas kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan PS Ilmu Politik FISIP UB sebagai berikut:

Tujuan 1

Menjadikan Program Studi Ilmu Politik FISIP UB sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kualitas akademik yang profesional di bidang ilmu politik di tingkat internasional melalui riset dengan kemampuan berpikir visioner, kritis, cerdas, peduli, berkeadilan dan beradab.

Sasaran : Terwujudnya pembelajaran berbasis pengajaran (*Program Basic Learning*)

Tujuan 2

Terbangunnya sistem pengelolaan program studi yang bermutu dan bereputasi sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2012.

Sasaran :

Terwujudnya program studi yang bermutu dan berkualitas baik dalam memperoleh peringkat akreditasi terbaik pada tingkat nasional bahkan internasional dengan meningkatnya kerjasama internasional., maupun peningkatan sarana dan prasarana standar mutu.

Tujuan 3

Menghasilkan Sarjana Ilmu Politik yang memiliki kompetensi mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memecahkan masalah bagi persoalan politik yang aktual, berjiwa entrepreneurial politik, berintegritas dan sensitif terhadap perubahan politik.

Sasaran: Terwujudnya kualitas lulusan yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing.

Tujuan 4

Keterbukaan, kesetaraan, keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi di bidang sosial dan politik

Sasaran

Terselenggaranya pengelolaan program studi yang baik.

Tujuan 5

Menghasilkan karya-karya penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang berorientasi terhadap pengembangan Ilmu Politik yang berkeadilan dan beradab serta mampu memberikan sumbangan nyata terhadap pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat yang menyangkut isu-isu perubahan politik dan publik.

Sasaran: Tercapainya pengakuan reputasi di bidang penelitian politik.

Tujuan 6

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi kepada perbaikan persoalan-persoalan perubahan politik dan penguatan kapasitas masyarakat, institusi politik dan pemerintah serta terjadinya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dengan masyarakat.

Sasaran: Terwujudnya peran Program Studi Ilmu Politik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan memecahkan masalah bagi persoalan politik yang aktual.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

3.1.1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat pendidikan tinggi adalah Kebijakan “Kampus Merdeka”. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu: (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi dan mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Dalam konteks perwujudan kemandirian, pelaksanaan konsep “Kampus Merdeka”, tantangan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pencapaian visi RPJMN 2020- 2024 adalah: (1) menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat; (2) meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar; (3) meningkatkan komersialisasi inovasi lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan Dunia Industri; (4) memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0; (5) mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU dan skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

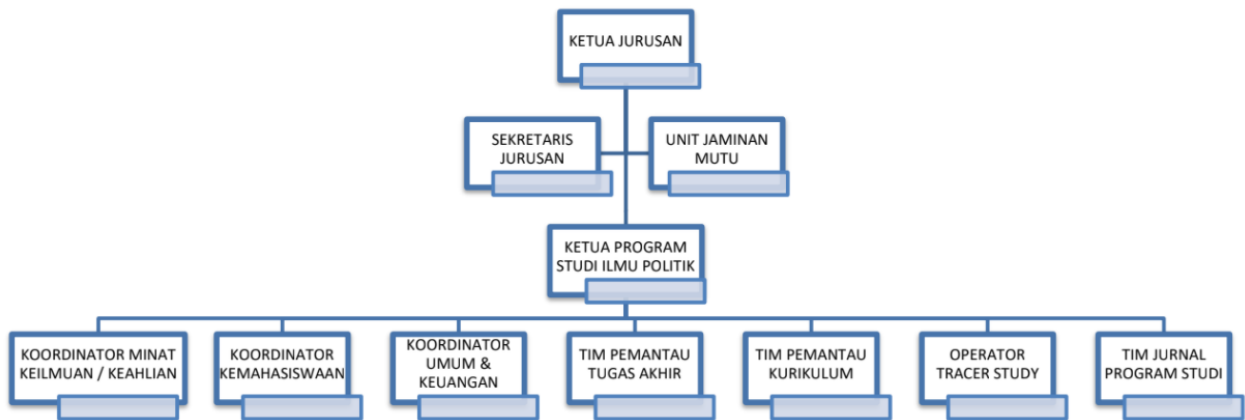
melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA); (6) memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3.1.2. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Rencana peralihan Universitas Brawijaya menjadi PTN-BH turut dijelaskan dalam Renstra UB 2020-2024, utamanya mengakomodasi tahapan I pengembangan jangka Panjang UB 2034-2039. Berkaitan dengan peralihan PTN-BLU menjadi PTN-BH, hal-hal sebagai berikut ini harus diakomodasi dalam masa transisi Universitas Brawijaya menuju PTN-BH, sebagai berikut:

- 1) Perbaiki tata kelola UB berkaitan dengan struktur organisasi dan uraian tugas dengan penjabaran organisasi, hubungan, dan kewenangan yang mendasarkan pada aspek produktivitas dan efisiensi. Beberapa unit kerja yang tidak diperlukan harus dirasionalisasikan;
- 2) Sistem pengelolaan keuangan harus dapat mengakomodasi inovasi kegiatankegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan termasuk pengelolaan manajemen keuangannya. Sistem informasi harus mampu mendeteksi dan mengelola dengan prinsip pengendalian internal yang kuat dan akuntabel;
- 3) Perlu adanya peningkatan konsistensi implementasi regulasi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kepastian regulasi dan keadilan. Upaya ini dapat diantisipasi dengan penegakan sistem reward dan punishment yang lebih tegas;
- 4) Perlu adanya pemetaan SDM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penilaian produktivitasnya;
- 5) Sistem pengukuran kinerja harus dapat dituntaskan pada masa peralihan dengan mengaitkan antara ukuran kinerja UB, ukuran kinerja unit kerja, dan ukuran kinerja individu. Mekanisme kontrak kinerja harus diimplementasikan secara terstruktur dengan penyelenggaraan sistem informasi yang efektif dan dapat dikaitkan dengan sistem remunerasi;
- 6) Permasalahan hak milik dan hak pengelolaan aset harus dapat diselesaikan untuk dapat menjamin status kepemilikan yang legal sesuai ketentuan;
- 7) Mekanisme pengelolaan badan usaha, model investasi UB terhadap Badan Usaha, hubungan badan usaha dengan UB, alokasi pagu anggaran berdasarkan pendapatan yang diperoleh, konsolidasi pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja dapat dituntaskan sehingga kontribusi badan usaha dapat terukur secara spesifik.

GAMBAR 2.2. STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FISIP UB



BAB IV TARGET KINERJA

Mengacu pada visi-misi Prodi Ilmu Politik, memperhatikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Prodi Ilmu Politik, maka Prodi Ilmu Politik menetapkan target kinerja selama empat tahun ke depan untuk bisa menjadi Program Studi yang unggul. Target kinerja ini juga mempertimbangkan arah pengembangan Universitas Brawijaya dalam rangka menuju World Class Entrepreneurial University (WCEU).

Target kinerja yang tersusun di bawah ini mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang sudah disusun oleh FISIP sebelumnya. Pada Renstra yang disusun FISIP untuk tahun 2021 – 2025, telah menetapkan 16 (enam belas sasaran strategis (SS) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya enam belas SS tersebut diturunkan secara mendetail dalam program-program yang lebih spesifik, setelah itu FISIP menetapkan kegiatan-kegiatan mendetail untuk mencapai tujuan Renstra lima tahun mendatang.

Masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh FISIP, menyertakan indikator terukur yang menjadi bahan acuan, sekaligus sebagai tolok ukur yang bisa dievaluasi keberhasilan atau kegagalan Renstra dalam mencapai target yang ditetapkan. Indikator tersebut secara berurutan disusun sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS),
- b. Indikator Program (IP), dan
- c. Indikator Kegiatan (IK).

Pada bagian indikator kegiatan (IK), secara mendetail dicantumkan jumlah (kuantitas/prosentase) capaian kegiatan di masing-masing tahun berjalan. Indikator kegiatan inilah yang kemudian menjadi acuan utama Prodi Ilmu politik dalam menyusun target capaian hingga lima tahun mendatang.

Diantara enam belas variabel yang ada dalam SS yang telah ditetapkan FISIP, tidak semua variabel diadopsi oleh Prodi Ilmu Politik, sebab sebagian diantaranya bukan menjadi tugas pokok fungsi Prodi, misalnya: tata kelola layanan fakultas, pengelolaan laboratorium, pembuatan kerja sama, dll. Sehingga hanya ada 8 (delapan) SS yang kemudian diadopsi Prodi Ilmu Politik dalam menyusun Renstra 2021 – 2025. Kedelapan SS tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS) 1	
Terwujudnya Prodi yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan pada kekhasan Prodi	
Indikator SS	Program
Internasionalisasi program studi	Peningkatan mahasiswa outbound
	Peningkatan mahasiswa inbound
	Peningkatan dosen outbound
	Peningkatan dosen inbound
Tersedianya prodi dengan akreditasi unggul atau A BAN PT	Peningkatan capaian PS terakreditasi unggul atau A BAN PT
Tersedianya Program Studi tersertifikasi Internasional	Peningkatan PS terakreditasi internasional

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Jumlah mahasiswa outbound ke universitas di luar negeri	5 mhs	5 mhs	5 mhs	10 mhs
2.	Jumlah mahasiswa inbound dari universitas luar negeri	5 mhs	5 mhs	5 mhs	10 mhs
3.	Jumlah seminar internasional yang terselenggara	1 x	1 x	2 x	2 x
4.	Jumlah kegiatan visiting lecturer yang terselenggara	1 x	1 x	1 x	2 x
5.	Jumlah dosen Ilmu Politik yang melakukan visiting lecturer ke luar negeri	1 x	1 x	1 x	1 x
6.	Program Studi Ilmu Politik terakreditasi A BAN PT	V			
7.	Program Studi Ilmu Politik tersertifikasi internasional				V

Sasaran Strategis 2	
Terwujudnya proses pembelajaran merdeka yang inovatif dan aplikatif dengan berbasis teknologi mutakhir	
IKSS	Program
Tersedianya program studi yang menggunakan teknik pembelajaran mutakhir	Pengembangan sistem pembelajaran mutakhir
Tersedianya prodi yang menerapkan kampus merdeka	Peningkatan penerapan kurikulum program studi yang disesuaikan dengan program kampus merdeka
	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar
	Peningkatan prodi dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Pemutakhiran RPS secara berkala	√		√	
2.	Pemutakhiran modul praktikum secara berkala		√		√
3.	Benchmarking penguatan kurikulum merdeka belajar dengan universitas terkemuka di Indonesia	1 x	1 x	1 x	
4.	Keberadaan pedoman kurikulum MBKM	50%	100%		
5.	Jumlah kerja sama MBKM dengan lembaga mitra	2	5	5	8
6.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM di lembaga mitra	10 mhs	15 mhs	20 mhs	20 mhs
7.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di universitas lain melalui program MBKM	5 mhs	10 mhs	10 mhs	15 mhs

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
8.	Jumlah mata kuliah yang ditawarkan sebagai mata kuliah lintas prodi/lintas universitas	2 mk	2 mk	4 mk	4 mk

Sasaran Strategis 3	
Terwujudnya Mahasiswa dan alumni Ilmu Politik yang berdaya saing dan berjiwa entrepreneur	
IKSS	Program
Tersedianya lulusan dengan masa studi tepat waktu	Percepatan penyelesaian tugas akhir Mahasiswa
Masa tunggu kerja pertama lulusan	Peningkatan kinerja dan kerjasama dengan unit bisnis dan unit pengembangan karir universitas
Tersedianya Mahasiswa dan lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	Peningkatan kompetensi Mahasiswa dan lulusan berdasarkan standar asosiasi/ lembaga profesi
Tersedianya mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha	Pembinaan kegiatan mahasiswa dengan berorientasi pada kemandirian berwirausaha
Partisipasi alumni dalam pengembangan program studi	Pengembangan sistem tracer study untuk alumni terintegrasi
Tersedianya mahasiswa berprestasi tingkat nasional	Pembinaan untuk mendorong mahasiswa berkompetisi & mendapatkan pengakuan tingkat nasional
Tersedianya mahasiswa berprestasi tingkat internasional	Pembinaan untuk mendorong mahasiswa berkompetisi & mendapatkan pengakuan tingkat internasional

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Persentase mahasiswa dengan masa studi 4 tahun	60%	75%	80%	85%
2.	Persentase alumni yang bekerja dengan masa tunggu kurang dari enam bulan	65%	75%	85%	90%
3.	Jumlah mahasiswa yang tersertifikasi kompetensi dan profesi	5 mhs	10 mhs	20 mhs	20 mhs
4.	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	5 mhs	10 mhs	15 mhs	20 mhs

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
5.	Jumlah alumni yang terlibat dalam kegiatan “Alumni Mengajar”	3	5	5	5
6.	Jumlah sumbangan alumni (berupa fasilitas) untuk mendukung proses pembelajaran	10 mhs	15 mhs	20 mhs	20 mhs
7.	Jumlah mahasiswa ilmu politik yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi akademis tingkat nasional	3 mhs	3 mhs	5 mhs	10 mhs
8.	Jumlah mahasiswa ilmu politik yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi non-akademis tingkat nasional	5 mhs	5 mhs	10 mhs	10 mhs
9.	Jumlah mahasiswa ilmu politik yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi akademis tingkat internasional	-	2 mhs	2 mhs	3 mhs
10.	Jumlah mahasiswa ilmu politik yang mendapatkan penghargaan dalam kompetisi non-akademis tingkat internasional	1 mhs	1 mhs	2 mhs	3 mhs

Sasaran Strategis 4	
Terwujudnya pelayanan prima yang sederhana, inklusif, dan mudah diakses	
IKSS	Program
Mewujudkan pelayanan yang spesifik, terukur, pasti, dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimum Universitas Brawijaya	Peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum Universitas Brawijaya

Indikator Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Pemutakhiran fitur layanan website Ilmu Politik berbasis standar pelayanan minimum	V	V	V	V
2.	Meningkatnya kepuasan pengguna atas layanan prodi	75%	85%	95%	95%
3.	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) layanan program studi	3	5	8	10

Sasaran Strategis 5	
Tersedianya daya dukung teknologi yang menunjang pemenuhan data dan informasi program studi	
IKSS	Program
Tersedianya basis data program studi untuk menunjang kegiatan civitas akademika yang terintegrasi	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan data untuk kebutuhan pengembangan sistem informasi terpadu

Indikator Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Ketersediaan Basis Data Terpadu mengenai judul PKM dan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik setiap angkatan yang aksesibel	75%	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan profil bidang keahlian dosen ilmu politik yang diunggah pada website Prodi	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6	
Terwujudnya pola pengembangan sumber daya manusia yang sistemik dan berjenjang	
IKSS	Program
Tersedianya sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan jabatan fungsional	Penyusunan SOP bagi unit kerja terkait dengan peningkatan jabatan fungsional
Tersedianya program untuk memfasilitasi studi doctoral dosen	Peningkatan jumlah dosen bergelar doctor

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Prodi memiliki SOP percepatan jabatan fungsional dosen	V			
2.	Pendampingan bagi dosen ilmu politik dalam mendapatkan LoA studi doctoral	V	V	V	V
3	Jumlah dosen bergelar doktor	35%	50%	60%	70%

Sasaran Strategis 7	
Pengembangan publikasi nasional dan internasional dengan memfasilitasi publikasi karya serta meningkatnya jejaring dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian	
IKSS	Program
Tersedianya inovasi dari penelitian dan pengabdian yang digunakan untuk kegiatan kolaborasi dengan pihak eksternal	Peningkatan partisipasi dosen dalam kompetisi penelitian dan pengabdian dalam skala nasional dan internasional

Indikator Kegiatan

No	Indicator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Jumlah penelitian nasional yang berkolaborasi dengan pihak eksternal	2	2	3	5
2	Jumlah pengabdian yang berkolaborasi dengan pihak eksternal	2	2	4	6
3	Jumlah penelitian internasional	2	2	4	4
4	Jumlah publikasi nasional	20	20	30	30
5	Jumlah publikasi internasional	5	5	8	10
6	Jumlah grant internasional	1	1	2	2
7	Jumlah grant nasional	3	3	5	5

Sasaran Strategis 8	
Peningkatan serapan hasil penelitian dan pengabdian berbasis kekhasan ke dalam dunia industri dan kelompok masyarakat	
IKSS	Program
H-index rata-rata Dosen FISIP UB	Peningkatan sitasi karya ilmiah
	Peningkatan citra dosen di tingkat nasional dan internasional
	Penguatan penelitian, pengabdian dan pengembangan potensi dosen
	Peningkatan kualitas publikasi dosen
Tersedianya publikasi penelitian kolaborasi internasional	Peningkatan keikutsertaan dosen dalam penelitian kolaborasi internasional
Tersedianya pengabdian masyarakat yang berdampak positif bagi peningkatan kapasitas ekonomi, sosial/kelembagaan, dan kebudayaan di masyarakat, serta unggulan daerah	Peningkatan kemampuan dosen dalam kompetisi usulan pengabdian
Inovasi yang dihasilkan dosen dan digunakan dalam industri dan masyarakat	Peningkatan jumlah HKI yang terdaftar

Indikator Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
1.	Jumlah sitasi atas karya ilmiah dosen Ilmu Politik	200	300	300	400
2.	Jumlah dosen Ilmu Politik yang terlibat kegiatan seminar nasional	10	10	15	15
3	Jumlah dosen Ilmu Politik yang terlibat kegiatan seminar di luar negeri	1	2	2	3
4	Jumlah dosen Ilmu Politik yang terlibat kegiatan konferensi nasional	5	5	8	10
5	Jumlah dosen Ilmu Politik yang terlibat kegiatan konferensi di luar negeri	1	1	2	2
6	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional	20	20	30	30

No	Indikator Kegiatan	Jumlah			
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
7	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional	4	4	6	8
8	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terindeks SINTA	15	15	20	20
9	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terindeks SCOPUS	4	4	5	5
10	Jumlah Dosen Ilmu Politik yang terlibat dalam riset kolaboratif berskala internasional	2	2	4	4
11	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mengusulkan proposal pengabdian kompetisi berskala nasional	5	5	8	8
12	Jumlah dosen Ilmu Politik yang mendapatkan hibah pengabdian kompetisi berskala nasional	1	2	2	2
13	Jumlah dosen Ilmu Politik yang berhasil memperoleh HKI	10	10	12	15

BAB V PENUTUP

Renstra PS Ilmu Politik Universitas Brawijaya sebagaimana dijabarkan pada bab 3 dokumen ini, telah menunjukkan alur yang sistematis dan konsisten dengan apa yang digariskan dalam visi-misi PS Ilmu Politik. Renstra dan Renop yang disusun untuk tahun 2021 – 2025 ini ditetapkan dalam rangka mencapai standar keilmuan PS di level internasional, sesuai visi hingga 2025 nanti.

Meskipun demikian, sebagai PS yang masih relative baru usianya, PS Ilmu Politik FISIP UB menetapkan tahapan capaian dalam mencapai visi misi di level internasional tersebut secara bertahap. Tahapan itu tercantum dalam *milestone* yang melengkapi dokumen visi PS Ilmu Politik yang ditetapkan.

Untuk mencapai atau mengimplementasikan Renstra di atas PS Ilmu Politik FISIP UB menyusun program kerja tahunan. Langkah pertama perencanaan tahunan adalah menjabarkan Misi dalam penetapan Sasaran dan Tujuan yang akan dicapai oleh PS Ilmu Politik FISIP UB.

Pada akhirnya, keberhasilan perencanaan (Renstra) ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, tidak hanya pimpinan PS Ilmu Politik, melainkan juga seluruh komponen PS Ilmu Politik, yakni dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.